

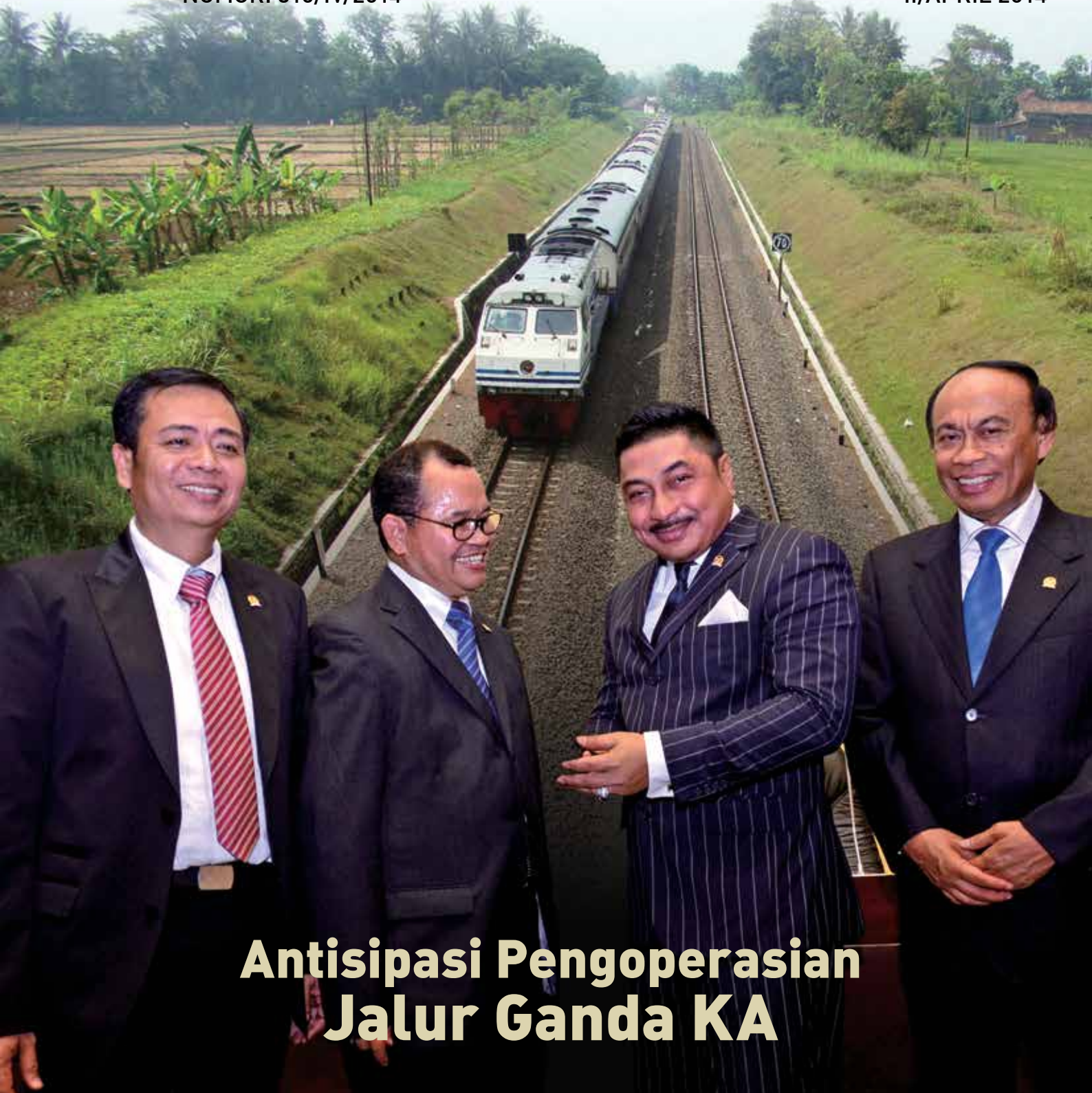


**BULETIN**

# PARLEMENTARIA

NOMOR: 810/IV/2014

II/APRIL 2014



## Antisipasi Pengoperasian Jalur Ganda KA

# KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA APRIL 2014

Minggu Kedua bulan April diisi dengan kegiatan Ketua DPR, yaitu melakukan pengambilan sumpah satu anggota DPR PAW tanggal 1 April 2014, Masalah PJTKI, Pernyataan Ketua DPR perihal himbauan terhadap KPK agar menangani kasus-kasus besar serta Acara Debat ILUNI UI

## Penggantian Antar Waktu (PAW) Satu Anggota DPR

Ketua DPR RI melantik satu anggota DPR PAW yang bernama H. Zaenuddin sebagai anggota DPR mewakili Partai Demokrat Dapil Banten I, menggantikan Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE, MM. Pelantikan ini dilakukan atas dasar Keppres No.20/P tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014. Pengambilan sumpah dilakukan pada tanggal 1 April 2014 pada pukul 21.00 WIB, bertempat di gedung DPR RI. UU No.27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 218 ayat 6, menetapkan bahwa “penggantian antar waktu anggota DPR tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikan, kurang dari enam bulan”. Dalam hal ini, perhitungan batas waktu enam bulan, jatuh pada tanggal 31 Maret. Sehubungan dengan hari libur nasional, maka pelantikan dilaksanakan pada tanggal 1 April 2014. Adapun waktu malam hari, dikarenakan padat nya jadwal Ketua DPR RI.

## Masalah PJTKI

Permasalahan TKI yang terus terjadi, terlebih kasus Wilfrida dan Satinah, menunjukkan hubungan antar negara sesama penganut Islam ini tidak betul-betul ditegakkan. Ketua DPR RI menyatakan bahwa sebagai negara Islam, dimana TKI yang bekerja di sana juga beragama Islam, seharusnya jangan ada tekanan untuk meminta ganti rugi atas kasus yang terjadi, dimana sudah jelas tidak mampu untuk dibayar. PJTKI dan Perusahaan Asuransi harus bertanggung jawab dalam masalah TKI yang terjadi. Permasalahan asuransi menjadi penting untuk diperhatikan, karena TKI sudah

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



membayar premi pada perusahaan asuransi ketika berangkat ke luar negeri. Asuransi wajib membayar, PJTKI wajib membantu dan sisanya baru negara. Membayar denda adalah tugas PJTKI dan asuransi, dan jangan meminta rakyat untuk patungan. Selain itu, intervensi seorang Raja Arab Saudi juga perlu. Hal ini untuk memberi pemahaman pada rakyatnya, bahwa jangan sampai ada unsur pmerasan. Latar belakang pembunuhan pun harus dilihat, termasuk di dalamnya jika terdapat unsur tekanan, yang memaksa TKI untuk membunuh majikannya. Tekanan psikologis dari majikan, atau mendapat perlakuan tidak adil, adalah contoh latar belakang terjadinya pembunuhan.

## Himbau terhadap KPK

Ketua DPR RI menilai bahwa Presiden sudah banyak mengeluarkan kebijakan dalam rangka pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi tidak hanya tergantung Presiden, namun juga penegak hukum baik polisi, jaksa maupun KPK. Tidak cukup hanya dukungan terhadap KPK, namun juga bagaimana agar KPK lebih mengutamakan kasus korupsi yang besar. Yang sifatnya “kecil” agar ditangani Jaksa dan Polisi. Hal ini terkait dengan Impres Pemberantasan Korupsi yang keluar akhir-akhir ini. Remunerasi khusus untuk aparat Jaksa dan Polisi yang melakukan penyidikan khusus, sangat dibutuhkan, mengingat bahwa Jaksa dan Polisi yang di luar KPK menerima gaji yang kecil. Besaran tunjangan yang ada mungkin tidak sama dengan Jaksa KPK, namun mendekati. Pemberian gaji yang besar, adalah sebuah dukungan untuk bisa bekerja dengan lebih baik/maksimal. Kalau ada orang yang tidak bersalah, namun ditetapkan menjadi tersangka oleh Jaksa, maka jabatannya langsung di copot. Dengan demikian, *reward* dan *punishment* nya jelas. Gaji kecil yang

diterima para Jaksa saat ini, diyakini oleh Ketua DPR RI berdampak pada pencarian “sampingan”.

### Debat ILUNI UI

Ikatan Alumni UI (Iluni) menggelar debat tokoh nasional pada tanggal 27 Maret 2014. Ketua DPR RI turut hadir dalam acara debat tersebut. Selain Ketua DPR RI, sejumlah tokoh nasional seperti Gubernur Jawa Timur (Soekarwo), mantan Kepala Staf AD (Ryamizard Ryacudu), Ketua DPD (Irman Gusman), mantan Ketua MK (Mahfud MD), mantan Wakil Presiden (Jusuf Kalla) turut hadir. Isu kaji ulang UUD 1945 turut dibincangkan dalam acara debat tersebut. Moderator mengemukakan bahwa MPR hanya kumpulan DPD dan DPR. sementara fungsi seperti menetapkan GBHN seperti pada UUD 1945 tidak dipunyai. Menanggapi hal ini, Ketua DPR RI menyampaikan bahwa penyempurnaan UUD 1945 akan lebih baik, daripada mengembalikan ke masa lalu. Terkait peran dan fungsi MPR dalam menetapkan GBHN, Ketua DPR menyatakan bahwa fungsi menetapkan GBHN oleh MPR tidak diperlukan. Menurut Ketua DPR, GBHN itu sama dengan RPJP (rencana Pembangunan Jangka Pan-

jang), RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Masalahnya hanya implementasi, bagaimana taat azas, dan itu sinergi dari atas sampai bawah. Persoalan antara pemerintah pusat dan pemda dinilai tidak sinergi. Apa yang dikerjakan pemerintah pusat belum tentu didukung oleh pemda. Ini perlu dibuat aturan sebagai pelengkap perundangan.

Terkait tema Pilkada langsung, Ketua DPR menilai bahwa untuk tingkat provinsi, sebaiknya gubernur ditunjuk oleh presiden, karena kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan bersifat koordinatif. Untuk kabupaten dan kota, tetap diperlukan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam debat tokoh tersebut, Ketua DPR menambahkan bahwa jika dikembalikan ke DPRD, kepedulian terhadap kepala daerah dan rakyat itu kurang. Mengenai korupsi yang marak terjadi di Indonesia, Ketua menilai bahwa perlu ada hukuman keras, namun menolak hukuman mati. Sebagai contoh, dibuang ke suatu pulau kecil, diminta beternak dan bercocok tanam untuk menghidupi dirinya. Hukuman tanpa upaya pencegahan, juga tidak akan menyelesaikan masalah. \*\*\*

## Antisipasi Pengoperasian Jalur Ganda KA



Raker Komisi V DPR dengan Menpera, Menhub, Menteri PU, dan Menteri PDT.

Peresmian penggunaan rel kereta api ganda Jakarta-Surabaya yang akan dilakukan pada bulan April ini memang sudah ditunggu masyarakat. Dengan rel ganda maka akan memperlancar arus barang dan jasa serta penumpang, sementara di sisi lain diharapkan akan mengurangi frekuensi penggu-

naan kendaraan bermotor sehingga jalur Pantura akan lebih awet.

Demikian dikemukakan anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo saat dihubungi Parle, Kamis (3/4) di Jakarta, menanggapi pernyataan Wakil Menteri Perhubungan yang menargetkan

Jakarta-Surabaya akan terhubung dengan rel kereta ganda pada April 2014. Menurut Wamenhub Bambang Susantono pekan lalu, jalur rel kereta ganda Jakarta-Bojonegoro sudah bisa dioperasikan secara penuh.

Beroperasinya rel kereta ganda



Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo.

Jakarta-Bojonegoro tersebut ditandai dengan peresmian pengoperasian rel ganda kereta api lintas utara Jawa Tengah antara Stasiun Wedu dan Stasiun Tobo lintas Semarang-Bojonegoro Jawa Timur sepanjang 19,5 Km.

Namun demikian, satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian jalur rel ganda keretapi ini, menurut Sigit adalah soal perlintasan kereta api. Dengan jalur ganda dipastikan frekuensi perjalanan akan meningkat sehingga masalah perlintasan harus diprioritaskan. "Saya pernah sampaikan, dalam pembangunan jalur ganda ini harus disiapkan secara holistik termasuk keamanan perlintasan KA. Jangan

sampai jalur ganda beroperasi, tetapi pintu perlintasan tidak disiapkan dengan baik," tegas politisi dari PKS ini.

Diingatkan kembali bahwa faktor keselamatan harus menjadi prioritas terutama di pintu perlintasan, sebab perlintasan yang otomatis jumlahnya sedikit sementara perlintasan manual yang masih dijaga petugas, jumlahnya sangat banyak. "Pemerintah harus antisipasi ini apakah dibangun fly-over atau perlintasan otomatis, yang penting pintu perlintasan jangan menjadi pemicu terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa," pesan Sigit.

Ia kemudian menunjuk contoh sejumlah kecelakaan KA yang terjadi termasuk di Bintaro baru-baru ini, karena kesalahan manusia atau peralatan perlintasan KA. "Kecelakaan yang mengancam jiwa manusia di perlintasan ini harus diperhatikan sungguh-sungguh," ia menegaskan.

#### Tiga kali lipat:

Sebelumnya Wamenhub Bambang Susantono mengatakan, pembangunan jalur ganda diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lintas kereta

barang dan penumpang dari sekitar 84 kereta menjadi 200 kereta per hari. Sebelumnya, frekuensi kereta barang Jakarta-Surabaya sebanyak 5 trip per hari dengan kapasitas 160 twenty foot equivalent units (TEUs) per hari.

Adanya rel ganda akan meningkatkan frekuensi hingga 3 kali lipat menjadi 15 trip per hari dengan kapasitas 500 TEUs per hari. "Dampaknya kapasitas lintasan kereta api akan bertambah, frekuensi kereta api bisa ditingkatkan 2-3 kali dan jumlah penumpang maupun barang meningkat," kata Bambang.

Pembangunan rel sepanjang 727 kilometer dilaksanakan secara *multi-years* sejak 2011 hingga 2014 dengan anggaran Rp 10,5 triliun. Pembangunan rel kereta ganda dibagi dalam 4 segmen antarlain Cirebon-Brebes 63 Km, Pekalongan-Semarang 90 Km, Semarang-Bojonegoro 180 Km, dan Bojonegoro-Surabaya 103 Km. Saat ini segmen Cirebon-Brebes dan Pekalongan-Bojonegoro sudah selesai dan sudah dioperasikan, termasuk Semarang-Bojonegoro. (mp) foto: iwan armanias/Parle.

## Sesalkan Test CPNS untuk Guru Honorer K II

Anggota Komisi II DPR RI, Jazuli Juwaini menyesalkan adanya test masuk CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) untuk para guru honorer. Peralnya menurut Jazuli, guru honorer yang notabene sudah teruji mengajar bertahun-tahun, sehingga sebenarnya tidak perlu diragukan lagi kemampuannya dalam hal mengajar.

"Saya berpendapat tidak perlu lagi digelar test CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) untuk guru honorer terutama yang masuk kategori dua (KII)," kata Jazuli kepada Parle beberapa waktu yang lalu.

Namun karena hal tersebut sudah berlangsung dan sudah menjadi kesepakatan bersama, maka yang dapat dilakukan



Anggota Komisi II DPR Jazuli Juwaini.

sekarang adalah terus memperjuangkan nasib guru honorer yang sudah mengabdikan bertahun-tahun.

"Saya ikut mendorong para guru honorer terutama yang sudah masuk kategori dua (KII) untuk terus memperjuangkan nasibnya. Karena bagaimanapun juga guru honorer telah mengabdikan bertahun-tahun lamanya, sehingga sudah tidak perlu diragukan lagi kemampuannya," ungkap Jazuli.

Jika memang keuangan negara tidak mencukupi untuk hal tersebut, Jazuli berharap adanya jalan lain yang bisa ditempuh untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Oleh karena itu, se usai masa reses pihaknya akan membahas hal tersebut dengan BKN. (Ayu) foto: Doc.Parle.



## Perawat Dihimbau Terus Suarakan Aspirasi

Para perawat termasuk bidan dihimbau terus suarakan aspirasi mengenai profesinya ke DPR. Ini demi kepentingan profesi para perawat. Apalagi Komisi IX DPR RI sedang menyusun Rancangan UU Keperawatan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatullah baru-baru ini. Selama ini, kata politisi Golkar tersebut, organisasi perawat yang terhimpun dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingannya ke Komisi IX DPR. Berbagai masalah di lapangan harus dikemukakan, agar Komisi IX DPR juga dapat mengawasi kinerja pemerintah

di bidang kesehatan.

Bahkan, Poempida menyarankan kepada organisasi perawat juga bidan untuk membuat resolusi menyangkut nasib mereka di tempat kerjanya masing-masing. Resolusi itu bisa disampaikan langsung ke DPR. "Harus ada resolusi dari bidan dan perawat yang bisa didorong ke DPR," harapnya.

Sementara soal hubungan kerjanya dengan para dokter, para perawat dan bidan punya bidang kerja sendiri yang berbeda dengan dokter. Masing-masing tenaga medis ini punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Perawat dan bidan adalah mitra dokter, bukan



Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatullah.

pembantu dokter, tegas Poempida.

"Pasalnya, profesi bidan dan perawat memiliki tanggung jawab masing-masing," kata Poempida. (ant, mh) foto: Doc.Parle.

## Komisi IX DPR akan Panggil Direksi RS Hasan Sadikin



Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning.

Komisi IX DPR RI dalam waktu dekat ini akan memanggil Direktur Utama dan Direksi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung terkait kasus penculikan bayi di rumah sakit tersebut.

"Penculikan bayi di rumah sakit ini bukanlah yang pertama kali dan juga ada beberapa kasus serupa yang terjadi di RS lain, sehingga atas keterledoran pihak rumah sakit ini kami

akan segera melakukan pemanggilan kepada Direksi RSHS," kata Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning di hadapan wartawan, di Sukabumi, Jumat (28/3).

Pemanggilan tersebut, menurut Ribka bertujuan mengungkap motif penculikan anak, termasuk mencari tahu jika ada transaksi jual beli sehingga si penculik tersebut nekat beraksi.

Dia mengemukakan setiap rumah sakit pengamanannya harus diperketat dan atas penculikan tersebut karyawan yang teledor harus mendapat sanksi tegas.

"Ini jelas ada keteledoran dari pihak rumah sakit, karena tidak hanya penculikan saja, kasus lain yang pernah terjadi di rumah sakit ini salah satunya seperti tertukarnya bayi. Kami juga mencurigai adanya keterkaitan dengan orang dalam atau ada kesengajaan. Maka dari itu kami juga meminta kepada polisi untuk mengungkap secara utuh kasus ini," tambahnya.

Ribka mengatakan, yang harus bertanggung jawab secara penuh atas kasus ini, ada Dirut RSHS sebagai pembina dan pemimpin karyawan-karyawannya.

"Kami juga merasa aneh kenapa setiap bayi yang lahir harus dibawa ke ruang bayi seharusnya langsung diberikan ke orang tuanya. Dan selesai reses ini kami akan memanggil Dirut RSHS untuk dimintai keterangan," kata Ribka. (ant/sc) foto: iwan armanias/parle.

# Setjen DPR *Sharing* Sistem Hukum dengan Mahasiswa Belanda



Deputi Bidang Perundang-undangan Johnson Rajagukguk dan Karo. Humas dan Pemberitaan Djaka Dwi Winarko.

Sebanyak 25 mahasiswa dan satu dosen pembimbing dari Erasmus Universiteit Rotterdam, Belanda mendatangi DPR RI. Mereka merupakan mahasiswa jurusan hukum, dan hendak bertukar pikiran serta berdiskusi tentang sistem hukum yang berlaku di kedua negara.

Para Mahasiswa ini diterima oleh Deputi Bidang Perundang-undangan Johnson Rajagukguk dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan Djaka Dwi Winarko, serta beberapa pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pertemuan berlangsung di *Operation Room*, Gedung Nusantara, Rabu (2/04).

“Mereka datang ke sini untuk berdiskusi dan *sharing* terkait sistem hukum di Indonesia, maupun Belanda. Diskusi juga mengarah ke konstitusi dan hukum syariah yang ada di Indonesia, termasuk proses pembuatan Undang-undang di DPR,” jelas Djaka, usai pertemuan.

Djaka menambahkan, kunjungan para mahasiswa Belanda ini merupakan pertama kalinya di DPR. Ia menilai, respon

dari mahasiswa ini juga sangat baik.

“Jika Setjen DPR atau Parlemen Indonesia study ke Belanda, untuk bisa mampir bukan hanya ke Parlemen Belanda saja, ada baiknya juga di Fakultas Hukum Erasmus. Mereka sangat senang jika kita mampir ke sana. Untuk mendiskusikan lebih dalam lagi terkait dengan masalah-masalah hukum,” tambah Djaka.

Dalam kesempatan yang sama, Johnson menyatakan apresiasinya terhadap kunjungan ini. Ia menilai, dengan diskusi ini dapat menambah wawasan bagi kedua belah pihak.

“Kita bertukar pikiran tentang sistem hukum antara Indonesia dengan Belanda. Dengan pertemuan ini, banyak hal yang kita diskusikan, walaupun mereka masih sebagai mahasiswa. Dengan ini, kita berharap pegawai dan perancang UU kita semakin mengetahui sistem hukum,” jelas Johnson.

Salah satu mahasiswa Erasmus, Jeffrey Tillema menyatakan rasa tertariknya dengan kunjungan ini. Ia mengaku mendapatkan pengetahuan tentang hukum di Indonesia.

“Ini menarik sekali. Kami menjadi tahu tentang hukum Indonesia. Kami menjadi tahu perbedaan hukum antara Indonesia dengan Belanda,” ucap Jeffrey yang berbicara menggunakan Bahasa Indonesia dengan terbata-bata.

Hal senada diungkapkan oleh Namirah Abdul Musad. Mahasiswa Erasmus keturunan Ambon dan Sumatera ini mengaku kunjungan ini membuka wawasannya tentang sistem hukum yang ada di Indonesia. Ia juga mengetahui bagaimana proses pembentukan UU.

Pertemuan diwarnai dengan tanya jawab serta diskusi yang hangat. Dan diakhiri dengan bertukar cinderamata dan foto bersama. (sf) foto: andri/parle/iw.

## RUU Standardisasi Harus Selesai Sebelum AEC

Anggota Komisi VI DPR RI, Ferrari Romawi mengatakan Rancangan Undang-undang tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian perlu segera diselesaikan, sebelum berlangsungnya *Asean Economic Community* (AEC) pada Tahun 2015 mendatang. Hal tersebut diungkapkannya di Gedung Parlemen, Rabu (2/4).

Dikatakan Romawi, dengan *Asean*



Anggota Komisi VI DPR Ferrari Romawi.

*Economic Community* (AEC) ini masyarakat ekonomi ASEAN kedepannya diharapkan menjadi satu kekuatan yang sangat besar. Sehingga *Asean* bisa sejajar dengan Cina, Amerika, Uni Eropa. Seluruh Negara ASEAN bisa berintegrasi dan bersama-sama menjadi lebih bagus. Namun konsekwensinya pasar Indonesia pun dibuka.

Selain SDM (Sumber Daya Manusia)

yang harus dipersiapkan untuk menyongsong AEC 2015 mendatang menurut Romawi adalah perlunya undang-undang standardisasi. Selama ini, Indonesia hanya memiliki SNI (Standardisasi Nasional Indonesia), namun belum ada Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai payung hukumnya. Sementara di negara-negara ASEAN lainnya sudah memiliki Undang-undang Standardisasi.

“Menjelang AEC 2015 semua negara Asean, kecuali Indonesia sudah memiliki Undang-Undang tentang Standardisasi sebagai payung hukumnya. Sementara Indonesia sendiri

meski sudah memiliki SNI namun belum memiliki undang-undang. Oleh karena itu, DPR akan berusaha secepat mungkin agar Rancangan Undang-Undang ini dapat diselesaikan sebelum 2015. InsyaAllah kami akan upayakan dalam dua atau tiga bulan kedepan bisa selesai,” ungkap Ferrari Romawi.

Masalah standardisasi dan penilaian kesesuaian, standar Indonesia dengan standar negara-negara di ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Filipina dan lain sebagainya sebaiknya harus sesuai. (Ayu)/foto: iwan armanias/parle.

## P3S DPR Adakan Ceramah Soal Waris dan Gizi Lansia

Persatuan Pensiun Pegawai Sekretariat Jenderal (P3S) DPR-RI dalam pertemuan berkala tiga bulanan, Rabu (2/4) di Gedung DPR, Senayan mengadakan ceramah berkaitan dengan masalah waris, wasiat dan hibah serta gizi bagi lansia. Ketua P3S DPR Toip Heryanto membuka acara tersebut dengan mengharapkan, dengan pertemuan berkala ini para pensiunan tetap bisa menjalin tali silaturahmi sekaligus sebagai salah satu upaya menjaga kesehatan dan panjang umur.

Diadakannya ceramah masalah waris dan gizi, menurutnya akan sangat bermanfaat. Perlunya pemahaman masalah waris lantaran para lansia yang akan mewariskan harta bendanya tidak meninggalkan keributan kepada ahli warisnya. Begitu pula pengetahuan soal gizi, sangat perlu bagi lansia sehingga di hari tuanya tetap sehat, segar dan bersemangat menjalani aktifitas sehari-hari.

Dalam paparannya, Ustadz Muhammad Rizal Lubis mengatakan, hibah adalah memberikan hak kepemilikan harta kepada orang lain tanpa ada kompensasi. Hibah disebut juga dengan istilah hadiah. Ia mengingatkan berdosa jika orang tua menghibahkan harta kepada anaknya tanpa persetujuan anak-anak yang lain. “ Karena itu perlu berpikir ulang untuk memberikan hibah kepada anaknya,” tegasnya.

Sedangkan wasiat adalah pemberian hak milik seseorang kepada orang lain atau lembaga baik berupa barang atau uang dan piutang. Wasiat berlaku jika yang berwasiat itu telah meninggal



Suasana pertemuan berkala P3S DPR.

dunia. Meski demikian wasiat hanya dibolehkan sebanyak sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Sementara itu ahli waris tidak boleh menerima wasiat, kecuali ahli waris yang lain mengikhalkannya.

Ahli gizi dari Rumah Sakit Harapan Kita Ani Prasetyaningsih menyampaikan 10 langkah agar dapat hidup lebih lama, sehat dan berarti untuk lansia. Diantaranya, menciptakan pola makan yang baik dengan selalu berupaya tidak makan sendiri dan berkumpul dengan keluarga. Mencegah resiko penyakit jantung dengan membatasi makanan berlemak, kolesterol dan

natrium serta perlu memperbanyak konsumsi sayur, buah dan kacang-kacangan. Agar ingatan tetap baik dan system syaraf tetap bagus, harus banyak makan vitamin B6, B12 dan asam folat (kacang-kacangan dan sereal).

Diharapkan pula para lansia mempertahankan berat badan ideal dengan makan sesuai kebutuhan, melakukan aktifitas, makan rendah lemak dan makanan yang kaya karbohidrat kompleks. Selain itu selalu berolah raga sesuai kemampuan masing-masing umur serta menjaga kesehatan rohani dengan meningkatkan ibadah. (mp)/foto: andri/parle/iw.

## DPR Nilai PAUD Penting



Anggota Komisi X DPR Herlini Amran.

Anggota Komisi X DPR RI Herlini Amran menilai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu dasar pendidikan anak yang penting. Pasalnya, PAUD merupakan langkah pertama anak dalam menempuh pendidikannya.

“Pendidikan anak usia dini itu memang penting. PAUD atau Taman Kanak-kanak merupakan tahap awal, dimana anak mulai bersosialisasi. PAUD untuk membentuk karak-

ter dan wawasan anak, termasuk menentukan pendidikan anak untuk jenjang berikutnya,” jelas Herlini saat dihubungi Parle via telepon, Selasa (1/04).

Namun, ia mengingatkan, walaupun PAUD perlu digalakan, tetap harus ada pengaturan. Ia meminta, jangan sampai ada overlap antara PAUD dengan TK. Bahkan, perlu ada sinergi antara PAUD, TK, dan SD.

“Akan lebih baik lagi, harus ada pengaturan, agar tidak overlap antara PAUD dengan TK. Jika PAUD ini memiliki konsep dan kurikulum yang baik, dalam artian bisa mencerdaskan anak-anak, harus kita dorong. Bila perlu, ada penataan ulang dan sinergi antara PAUD, TK sampai SD,” tambah Politisi PKS ini.

Sementara itu, di kesempatan berbeda, Anggota Komisi X DPR RI Abdul Kadir Karding menilai, PAUD perlu diterapkan di seluruh Indonesia. Karena pada usia tersebut sangat baik untuk membentuk karakter seseorang.

“Sebenarnya bukan hanya pendidikan dasar, tetapi menjadi wajib bagi kita untuk mulai memperhatikan pendidikan anak usia dini karena ini merupakan umur emas di mana mereka harus disentuh dengan baik sehingga tumbuh karakter yang baik,” kata Karding.

Politisi PKB ini juga menekankan, ke depannya pemerintah harus memperhatikan PAUD. Jangan sampai anak-anak tidak menjalani pendidikan di tingkat PAUD, terutama di desa-desa. (sf) foto: [odjie/parle/iw](http://odjie/parle/iw).

## Ketua DPR Lantik Anggota PAW

Ketua DPR RI Marzuki Alie melantik satu Anggota DPR Pengganti Antar Waktu (PAW). Anggota PAW yang dilantik adalah Zaenuddin, menggantikan Anggota Komisi X Iti Octavia Jayabaya.

Sebagaimana pemberitaan di berbagai media, Iti telah dilantik menjadi Bupati Lebak, Banten pada awal tahun ini. Ada hal yang menarik dalam pelantikan PAW ini, karena acara baru diselenggarakan mendekati pukul 21.00 WIB. Acara berlangsung di Operation Room, Gedung Nusantara, Selasa (1/04).

“Ini untuk pertama kalinya pelantikan dilaksanakan malam hari. Karena hari ini, saya di luar kota, sedangkan hari ini pula merupakan hari terakhir dimana pelantikan itu bisa dilakukan. Menurut



Ketua DPR RI Marzuki Alie melantik anggota PAW Zaenuddin.



ketentuan undang-undang, PAW hanya bisa dilakukan paling lambat 6(enam) bulan sebelum periode berakhir. Kalau tidak cukup enam bulan, PAW tidak bisa dilaksanakan lagi,” jelas Marzuki.

Acara berlangsung dengan khidmat, dan dihadiri berbagai pejabat, diantaranya Sekjen DPR Winantuningtyastiti dan Wasekjen, serta Deputy dan Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal

DPR RI. Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari seluruh pejabat kepada Anggota PAW. (sf) foto: andri/parle/iw.

## DPR Prihatin Kasus Penembakan di Aceh



Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyampaikan rasa duka dan keprihatinan atas kasus penembakan di Bireuen, Aceh oleh pelaku tak dikenal yang mengakibatkan 3 korban meninggal dunia. Ia meminta kasus ini harus mendapat perhatian penuh dari petugas keamanan.

“Saya menyampaikan keprihatinan dan rasa duka atas kasus penembakan ditengah suasana kampanye. Saya melihat pelakunya semakin berani, kejadiannya bukan ditempat sepi, tapi di jalan raya,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (1/4/14).

Politisi dari Fraksi PKS ini menyebut aspirasi yang diperolehnya dari warga masyarakat, ada kekecewaan karena lambannya aparat dalam menindaklanjuti kasus penembakan yang pernah terjadi sebelumnya. Sehingga tindakan hukum dan efek jera kepada pelaku tidak berjalan.

“Saya coba sounding kepada masyarakat terkait situasi dan kondisi di Aceh ini, memang mereka sebut salah satu faktor yang paling memberikan kontribusi utama maraknya aksi-aksi ini karena lemahnya penegakan hukum,” paparnya wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Aceh I ini.

Bicara pada kesempatan berbeda Nova Iriansyah anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat juga menyampaikan keprihatinannya. Ia meminta komitmen pihak keamanan agar segera mengungkap kasus penembakan ini.

“Saya sangat prihatin atas kondisi yang tidak kondusif dan prihatin atas tindak kekerasan yang terjadi. Kami minta kekerasan dihentikan sekarang juga dan pihak keamanan segera menangkap pelaku kekerasan tersebut,” tandasnya.

Kasus penembakan dengan senjata laras panjang AK-47 di Bireuen, Aceh terjadi Senin (31/3) malam. Sebuah mobil simpatisan Partai Aceh jadi korban, 3 penumpangnya meninggal, satu orang diantaranya anak berusia 1,5 tahun. Sebelumnya ditempat berbeda terjadi penembakan terhadap simpatisan dan pimpinan Partai Nasional Aceh. (iky) foto: ivan armanias/parle.

## Pemindahan Frekuensi Smartfren Cacat Hukum

Anggota Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya menilai pemindahan Frekuensi Smartfren dari Frekuensi 1900 MHz ke Frekuensi 2,3 GHz adalah proses yang cacat hukum. Hal tersebut disampaikan Tantowi Yahya kepada Parle, Rabu (2/4).

Sebagaimana beredar wacana di masyarakat bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan memindahkan Smartfren dari Frekuensi 1900 MHz ke 2,3 GHz dengan alasan terjadi gangguan sinyal perangkat radio Smartfren terhadap operator 3G Global System for Mobile Communication (GSM) yang beroperasi pada frekuensi 1800 Mhz.

Dari pemindahan tersebut operator yang berada dibawah naungan Sinar Mas Group itu akan mendapat tambahan frekuensi hingga empat kali lipat. Konon, hal ini akan mem-



Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya.

buka peluang terjadinya korupsi yang akan merugikan Negara.

“Frekuensi adalah ranah terbatas milik rakyat yang penggunaannya seutuhnya untuk kemaslahatan rakyat. Sehingga jika ada perubahan atau pemindahan kepemilikan, penjualan atau penyewaan frekuensi haruslah melibatkan rakyat atau DPR sebagai representasi rakyat Indonesia. Namun kenyataannya Kemkominfo sama sekali tidak melibatkan DPR,” jelas Tantowi.

Dilanjutkan politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, ia menilai di saat masa peralihan DPR atau injury time ini seperti dimanfaatkan pemerintah untuk membuat keputusan strategis yang menyangkut kedaulatan rakyat dan aset terbanyak milik rakyat, seperti halnya pemindahan frekuensi smartfren ini. Padahal sesuai undang-undang pemindahan

frekuensi hanya bisa dilakukan atas persetujuan DPR.

“Pemindahan frekuensi Smartfren itu walau menggunakan Permen (Peraturan Menteri), namun tidak boleh bertentangan dengan UU di atasnya yang merupakan produk DPR,” tegas Tanto, begitu ia biasa disapa.

Meski demikian dikatakan Tantowi, Komisi I tidak akan tinggal diam, usai masa reses bulan Mei mendatang pihaknya akan langsung memanggil Menkominfo untuk memberikan klarifikasi serta penjelasan terkait rencana tersebut. Dan jika kemudian terjadi pelanggaran

Undang-undang yang akibatnya bisa menimbulkan kerugian negara tentu hal tersebut harus diusut secara tuntas. (Ayu) foto: rizka/parle/iw.

## Kasus Satinah : DPR Harap Presiden Menemui Pemerintah Arab



Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning.

Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning mengharapkan pemerintah dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudoyono menemui pemerintah Arab Saudi. Kehadiran presiden sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah kepada Warga Negeranya ketika dia bermasalah.

Hal tersebut disampaikan Ribka saat Dialog Bersama Wakil Rakyat di Studio RRI Gedung DPR Jakarta, Jumat (27/3) terkait kasus Satinah, TKI di Arab Saudi yang divonis hukuman mati karena telah membunuh majikannya.

“Ada kepedulian, ada hadir pemimpin negara ketika rakyatnya bermasalah. Namun presiden kita ketika rakyatnya bermasalah masih bersurat-bersurat,” tegas Ribka.

Menurutnya, ketika ada persoalan ini, tinggal tanggung jawab presiden. Karena Menteri Tenaga Kerja kita sudah pergi ke Arab, namun permasalahan masih tetap begitu. Dulu, ujarnya, saat pemerintahan Gus Dur ketika ada TKI yang mau di pancung, Gus Dur menemui Raja Arab yang akhirnya tidak jadi hukuman itu. Demikian pula ketika, warga Filipina akan di hukum, presidennya menghadap Raja Arab, juga tidak jadi hukuman tersebut.

Ribka menyesalkan sikap pemerintah. Menurutnya, pemerintah ketika terpojok menyatakan Satinah TKI ilegal dan lain-lain. Harusnya tidak seperti itu, apapun dia adalah Warga Negara Indonesia, paparnya.

“Kita harus menyelamatkan Satinah. Karena dia bekerja ke Arab bukan tujuan untuk membunuh, dia membunuh karena keterpaksaan. Dia tertekan dan terjepit posisinya. Dan apapun tuduhan Warga Negara Indonesia di luar, itu tanggung jawab negara untuk melindungi. Kita jangan menghakimi warga negara kita sendiri,” tandas politikus PDI Perjuangan ini.

Terkait uang diyat sebesar Rp 21 miliar yang dibebankan kepada pemerintah. Apakah pemerintah harus mengeluarkan dari APBN. Dijawab Ribka, “Yang menjadi persoalan, SBY harus hadir dulu. Ini persoalan waktu tanggal 3 April.”

Dijelaskan Ribka, dana untuk perlindungan TKI di luar negeri tumpang tindih. Ada di BNP2TKI, Kemenakertrans dan ada juga di Kemlu, demikian juga ada di konsorsium asuransi. Dirinya heran, karena nasib TKI tetap saja. “Jangan menyatakan dia pahlawan devisa, tapi ketika dia bermasalah tidak peduli,” pungkasnya.

Ribka menambahkan, ada hak TKI melalui konsorsium asuransi TKI saat TKI di pra penempatan, masa penempatan dan pasca penempatan. Seharusnya dana tersebut digunakan untuk persoalan-persoalan ketika TKI-TKI kita bermasalah seperti yang menimpa Satinah saat ini.

Ribka berpendapat boleh saja mengumpulkan dana untuk Satinah sebagai bentuk solidaritas kecintaan sesama karena sebangsa. Tapi persoalannya tidak selesai di situ. “Tapi ada hak-hak yang memang harus diperjuangkan supaya itu jatuh pada TKI,” tegasnya. (sc), foto : iwan armanias/parle.



## Polri dan TNI Harus Satu Visi dalam Pengamanan Aceh

Sejumlah kasus penembakan yang dilakukan kelompok tidak dikenal di Provinsi Nangro Aceh Darussalam menunjukkan perlu ada evaluasi terhadap penanganan masalah keamanan di wilayah paling barat NKRI ini. Salah satu yang perlu ditinjau adalah koordinasi antara Polri dan TNI.

“Menghadapi kasus penembakan ini memang perlu koordinasi, kekompakan ya. Harus satu visi antara aparat Polri dan TNI bagaimana melihat Aceh. Kalau kemudian visi saling berbeda memang repot,” kata anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil saat dihubungi di Jakarta, Selasa (1/4/14).

Dari informasi yang diperolehnya senjata yang digunakan pelaku diduga merupakan sisa konflik dimasa lalu yang tidak diserahkan kepada aparat. Namun lanjut politisi Fraksi PKS ini tidak tertutup kemungkinan merupakan senjata baru yang diseludupkan dan lolos dari jaring petugas.

Ia juga mengkritisi kinerja intelejen yang gagal membaca kondisi yang mungkin terjadi. “Yang kita sayangkan kenapa kepolisian, terutama aparat intelijen bekerja intensif misalnya di daerah rawan seperti Bireuen, Aceh Timur, Pidie sehingga kemudian bisa mendeteksi potensi seperti ini. Akhirnya orang berfikir aparat keamanan dimana?” tandasnya.

Bagi wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Aceh I ini serangkaian kasus penembakan menunjukkan pelakunya hafal sekali dengan situasi dan kondisi di Aceh. Apalagi tempat kejadian perkara bukan di pedalaman tetapi di jalan raya.

“Apakah ini ada masalah perseteruan antar kubu atau



Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil.

apapun namanya, sebagai warga negara mereka berhak untuk mendapat perlindungan dari negara,” pungkias dia.

Kasus penembakan dengan senjata laras panjang AK-47 di Bireuen, Aceh terjadi Senin (31/3) malam. Sebuah mobil simpatisan Partai Aceh jadi korban, 3 penumpangnya meninggal, satu orang diantaranya anak berusia 1,5 tahun. Sebelumnya ditempat berbeda terjadi penembakan terhadap simpatisan dan pimpinan Partai Nasional Aceh. (iky) foto: andri/parle/iw.

## Parlemen Laos Timba Pengalaman dari DPR-RI

Parlemen Laos akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang *Asian Interparliamentary Assembly* (AIPA) pada tahun ini. Untuk itu, Parlemen Laos ingin menimba pengalaman dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI yang pernah sukses menjadi tuan rumah.

Delegasi sekretariat Parlemen Laos yang dipimpin Viengthavibone Thephachank diterima Kepala Biro Sekretariat dan Pimpinan, Setjen DPR RI Tatang Sutharsa, Selasa (1/4). Dalam pertemuan tersebut, sekretariat Parlemen Laos banyak bertanya dan mendengarkan pemaparan dari para staf Badan Kerja Sama Antarparlemen



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti didampingi pejabat Setjen DPR menerima Delegasi Sekretariat Parlemen Laos.

(BKSAP) DPR yang ikut hadir memberi penjelasan.

Sebetulnya Laos sendiri sudah pernah menjadi tuan penyelenggaraan AIPA 2005. Namun, karena para pejabat sekretariatnya sudah pindah posisi dan anggota parlemennya juga sudah berganti, jadi mereka ingin tahu lebih banyak bagaimana harus mempersiapkan perhelatan sebesar sidang AIPA. Dan Setjen DPR RI menjadi rujukan utama untuk mengetahui seluk beluk

persiapan AIPA.

Rencananya, pada Mei dan September, Laos akan menjadi tuan rumah pertemuan AIPA. Dari persiapan menerima delegasi parlemen di bandara, menyiapkan hotel, menyiapkan agenda isu, keamanan, mengundang pers, dan lain-lain sudah dijelaskan kepada delegasi Parlemen Laos.

“Jadi berbagai aspek sudah mereka tanyakan. Kita berikan informasi

bagaimana menjadi tuan rumah,” jelas Tatang. Parlemen Laos sangat antusias menjadi tuan rumah dan sangat berterima kasih kepada Setjen DPR RI yang telah berbagi pengalaman menarik dalam menyelenggarakan AIPA. “Nah, semua kita sudah berikan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka bisa mencontoh apa yang sudah kita lakukan, karena kita sudah sering kali menyelenggarakan ini,” harap Tatang lagi. (mh), foto: andri/parle/hr.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Mahrus Munir.

## Kinerja Baznas Masih Minim

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Mahrus Munir menilai meski sudah ada peningkatan, namun kinerja Baznas (badan amil dan zakat nasional) masih terbilang sangat minim. Hal tersebut diungkapkannya kepada Parle di Jakarta, Selasa (1/4).

“Walau sudah ada peningkatan dari tahun sebelumnya namun secara keseluruhan saya lihat kinerja Baznas masih sangat minim, hal tersebut terlihat dari masih minimnya tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyerahkan zakatnya melalui Baznas,”ungkap Mahrus.

Minimnya tingkat kepercayaan dari masyarakat tersebut lanjut Munir, disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya masih kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari lembaga tersebut kepada publik. Sehingga membuat masyarakat kurang merasa yakin bahwa zakat yang akan diberikannya

itu akan disalurkan kepada orang yang tepat, atau dengan kata lain tepat sasaran.

Bahkan tidak jarang menurut Munir, jika pun ada yang menyalurkan zakat dan amalannya kepada lembaga tersebut hal tersebut lebih kepada sebuah “keterpaksaan” karena berada dalam sebuah instansi yang mengharuskannya menyalurkan zakat melalui Baznas.

Selain itu masih adanya sikap tradisional masyarakat yang menganggap membagikan zakat sendiri kepada Mustahik (orang yang berhak menerima zakat) lebih afdhal dari pada melalui badan resmi seperti Baznas. Hal itu juga menjadi salah satu sebab masih kurang berperannya badan ini.

“Minimnya sosialisasi kepada masyarakat akan badan ini juga menjadi sebab belum maksimalnya kinerja Baznas. Oleh karena itu menurut saya perlu adanya sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat atau muzaki bahwa tidak ada bedanya memberikan zakat langsung kepada mustahik atau melalui Badan resmi seperti Baznas,” papar politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini. (Ayu) foto: iwan armanias/parle/hr.

## Utamakan KPK Tangani Kasus-kasus Besar

Ketua DPR Marzuki Alie menilai Presiden sudah banyak mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka pemberantasan korupsi. Masalahnya, pemberantasan korupsi itu bukan hanya tergantung Presiden tetapi penegak hukum baik polisi, jaksa maupun KPK.

“Makanya ini yang harus diperbaiki. Bukan hanya mendukung KPK tetapi perlu diupayakan bagaimana lembaga itu lebih mengutamakan untuk menangani kasus korupsi yang besar. Sesuai perannya untuk membongkar korupsi berdasar



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

atau korupsi pajak triliunan. Artinya korupsi besar sebaiknya ditangani oleh KPK, jangan recehan. Yang recehan ini serahkan kepada jaksa dan polisi,” katanya menanggapi diterbitkannya Inpres pemberantasan korupsi baru-baru ini.

Kepada aparat jaksa dan polisi, Ketua DPR mengharapkan diberikan remunerasi khusus. Artinya bagi jaksa yang mendapatkan tugas untuk melakukan penyidikan diberikan tunjangan khusus, mungkin tidak sama dengan jaksa KPK paling tidak mendekati. Yang dipertanyakan, kenapa jaksa dan polisi begitu masuk KPK menjadi baik, karena gajinya besar. “Gaji jaksa dan polisi di KPK kan besar sehingga nggak mikir yang lain. Sementara jaksa dan polisi yang di luar KPK gajinya kecil,” katanya.

Menurut Marzuki, pihaknya tidak mengesahkan bahwa yang gaji kecil itu bekerja tidak baik, tetapi itu salah satu upaya dukungan untuk bisa bekerja baik dengan diberi gaji besar. Tetapi kepada mereka juga harus diberi sanksi berat, kalau orang tidak bersalah dijadikan tersangka, maka dicopot. “Kalau jaksa memutuskan orang tidak bersalah dijadikan tersangka, langsung copot,” tegasnya.

Kalaupun jaksa tersebut terbukti main-main maka langsung pidanakan. “Jadi ada *rewardnya* dan *punishmentnya*. Itu harusnya dilakukan oleh polisi dan jaksa. Jangan mendololimi rakyat, cari-cari kesalahan, pokoknya tersangka dulu. “Kan kasihan, kadang-kadang belum tentu salah pokoknya di pengadilan, ini kan merusak. Kalau ternyata di pengadilan bebas, makanya jaksa harus diberi sanksi manakala pembuktiannya tidak kuat,” tegasnya.

Bahkan bila perlu, Ketua DPR mengusulkan 10% dari harta penyiataan diberikan untuk jaksa, sehingga semangat untuk mengembailkan kerugian negara besar. Jangan gaji jaksa hanya 5 juta dan pemeriksa 4 juta, dituntut harus bekerja baik. Beda dengan KPK yang gajinya 50 juta belum lagi diberi kewenangan boleh menyadap. “Coba jaksa diberi kewenangan menyadap kan ramai, seru dan akan banyak orang yang ditangkap,” tegasnya lagi.

Ia mengakui dengan gaji yang diterima sekarang, para jaksa tetap bekerja tetapi ada dampaknya. Namun lanjut dia, bagi jaksa yang tidak tahan banting akan cari-cari sampingan juga. Dengan gaji besar, Marzuki optimis mereka tidak akan terpengaruh. (mp), foto : andri/parle/hr.

## Cegah Penyimpangan, Dana Bansos Patut Ditunda

Ketua Komisi III DPR RI Pieter C. Zulkifli mengatakan dapat memahami usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar pencairan dana Bansos (Bantuan Sosial) ditunda sampai pelaksanaan pemilu selesai. Ia mengakui pengucuran dana ini sering disalahgunakan untuk kepentingan pemilu, terutama oleh partai yang sedang berkuasa.

“Berdasarkan fenomena terdahulu penggunaan dana Bansos sering disalahgunakan untuk kepentingan pemilu. Saya dapat memahami usulan KPK pencairannya ditunda dalam kapasitasnya melakukan pencegahan untuk menghindari penyelewengan,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (28/3/14).

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi III dari FPKS Aboe Bakar Al Habsy yang menyebut penyaluran Bansos sebagai program pemerintah sering diakui sebagai keberhasilan partai tertentu. Walaupun sepakat ditunda namun ia meminta pada bidang tertentu seperti pendidikan penyerahan Bansos harus tepat waktu.

“Dana Bansos patut di-suspend sementara. Namun dana bantuan operasional sekolah, bantuan siswa miskin, program Bidik Misi dan renovasi sekolah jangan sampai ditahan, itu harus tepat waktu,” tekannya.

Secara khusus ia juga mendukung rekomendasi KPK agar dana Bansos dikelola oleh Kementerian Sosial agar memu-



Ketua Komisi III DPR Pieter C. Zulkifli.

dahkan pengawasan dan pertanggungjawaban.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyebut dalam iklim rezim korup seperti sekarang ini penyaluran dana Bansos rawan dikorupsi. “Pemerintah diharapkan berani menunda pencairan dana yang sudah ditetapkan dalam APBN 2014 hingga pemilu selesai, demi terjaminnya Bansos untuk rakyat,” ujar dia. (iky), foto : naefurodjie/parle/hr.

# Kebijakan Impor Bawang Merah Harus Konsisten

Penerapan kebijakan impor bawang merah dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, dihimbau agar konsisten dilakukan. Jangan saat bawang merah melimpah, pemerintah malah mengimpor bawang merah.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi IV DPR RI Siswono Yudohusodo baru-baru ini kepada Parlemen. Seperti diketahui, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri mengeluarkan referensi harga, bila harga bawang merah sudah mencapai Rp 25.500/kg di tingkat konsumen atau Rp 15.500/kg di tingkat petani, maka dibuka impor. Menurut Siswono, aturan itu bagus asal dilakukan secara konsisten.

“Aturan itu saya rasa baik jika dilaksanakan secara konsisten. Itu menjadi tugas pemerintah menjaga harga suatu komoditas. Di satu sisi harus menguntungkan produsen seperti petani ataupun nelayan, dan di sisi lain juga tidak memberatkan konsumen. Jadi, kalau harga bawang merah mencapai Rp30 ribu/kg, berarti permintaan atau kebutuhan lebih ba-



Anggota Komisi IV DPR Siswono Yudohusodo.

nyak dibanding produksi, maka boleh impor,” kata anggota F-PG itu.

Sebaliknya, bila harga di tingkat konsumen sudah di bawah Rp 15.000/kg berarti produksi sudah melimpah. Saat kondisi seperti ini, harga bawang jangan dipukul dengan impor, karena akan menjatuhkan harga di tingkat petani. Atau ketika harga sudah melambung di tingkat konsumen, lalu para petani sedang mendekati masa panen bawang merah, pemerintah malah keburu mengeluarkan kebijakan impor. Ini juga tidak menguntungkan.

Pemerintah sebenarnya sudah mengetahui siklus masa panen para petani. Siswono lalu mencontohkan, biasanya panen bawang pada April dan Juli. Nah, di bulan Juni sebaiknya tidak ada kebijakan impor, karena akan memukul harga petani. Bila masih mengimpor saat mendekati masa panen, berarti ada yang sengaja memperlmainkan harga. Bila harus impor, jumlahnya juga harus dibatasi agar tidak merusak harga di dalam negeri. Semuanya dilakukan secara terukur.

“Pemerintah sebenarnya paham bagaimana siklus bawang ini. Tapi, kita tidak bisa menutupi kenyataan bahwa dalam tata niaga komoditas pertanian di Indonesia itu, sarat dengan permainan. Yang terbongkar di impor sapi. Di hortikultura, ada lobi antara importir hitam dengan memanfaatkan pejabat pemerintah. Sudah banyak yang terungkap, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Saya tahu lobi-lobi yang dilakukan oleh importir itu,” ungkap Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR RI ini. (mh) foto: iwan armanias/parle.

## Gugus Tugas Dana Kampanye Disambut Baik

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Al Muzammil Yusuf menyambut baik terbentuknya Gugus Tugas Dana Kampanye yang digagas oleh lima lembaga negara yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), PPAK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan), KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan KIP (Komisi Informasi Pusat). Sinergi ini diharapkan dapat mendorong Pemilu berkualitas.

“Sebenarnya ini sudah merupakan tugas masing-masing lembaga ini akan tetapi karena ini dilakukan sinergi, kita harapkan hasilnya akan lebih baik. Jadi bangsa ini boleh berharap pemilu kali ini lebih berkualitas,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (28/3/14).

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Nudirman Munir mengungkapkan hal senada. Baginya untuk menilik kemungkinan penyimpangan dana kampanye tidak terlalu sulit, salah satunya dengan menyisir sejumlah billboard besar caleg yang tersebar di sejumlah jalan protokol.

“Saya mencatat cukup banyak penyimpangan logistik pemilu oleh parpol. Lihat saja misalnya billboard yang tersebar disetiap sudut jalan protokol di Indonesia yang dengan mudah dihitung. PPAK, Bawaslu bisa memulai dengan mencurigai sumber dana dari billboard itu,” ungkapnya.

Bicara pada kesempatan berbeda Direktur Pemeriksaan dan Riset PPAK



Wakil Ketua Komisi III DPR Al Muzammil Yusuf.

Ivan Yustiavandana mengatakan kerja sama ini untuk mendukung Pemilu bersih dan caleg amanah. Pihaknya dalam kerja sama ini bertindak sebagai institusi yang menyampaikan sejumlah data.

“PPAK secara intensif melakukan follow the money dari pihak yang terlibat dalam pemilu kali ini. Sebagian riset sudah kita sampaikan kepada Bawaslu dan KPK. Kita tentu juga berharap caleg dalam Pemilu kali ini bersih, amanah,” pungkask dia. (iky) foto: andri/parle/iw.



# Wakil Bicara



Ketua DPR RI Marzuki Alie

“Pemilu Legislatif dipercepat (30-31 Maret) di luar negeri memberikan kesempatan kepada seluruh Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dan memiliki hak pilih untuk memberikan suaranya. Kalau pemilu di luar negeri dilaksanakan pada 9 April nanti, saya tidak yakin suara mereka dapat diperhitungkan. Namun, hasil pemilu itu jangan dibuka sampai 9 April”.

“Salah satu poin Undang-undang Kebudayaan adalah sebagai pelindung sumber daya kesenian terutama para pekerja seni. Semoga dengan adanya Undang-undang ini juga tersedia asuransi bagi pelawak. Karena saya menilai saat ini insan seni belum dimaksimalkan dan dimanusiakan oleh pemerintah. Itu membuat saya miris.”



Anggota Komisi X DPR RI Eko Hendro Purnomo



Anggota Komisi IV DPR RI M Ali Yakob

“Aceh punya potensi cukup besar untuk sektor pertanian, namun kemampuan tersebut belum tergarap secara maksimal untuk mendongkrak pendapatan masyarakat yang bekerja di bidang itu.”

# DPR Ikut Berduka Cita Atas Musibah MH 370

Akhirnya, setelah dua pekan pencarian, pesawat Malaysia Airlines MH370 pun ditemukan. Senin (24/03) lalu, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menyampaikan bahwa penerbangan pesawat yang seharusnya bertujuan ke Beijing, China itu berakhir di wilayah selatan Samudra Hindia.

Pernyataan dari orang nomor satu di Malaysia itu disampaikan setelah pesawat pengintai China dan Australia melihat benda-benda yang diduga puing-puing MH370 di wilayah terpencil Samudra Hindia, 2.500 kilometer sebelah barat daya kota Perth, Australia.

Mendapat berita ini, Ketua DPR RI Marzuki Alie mewakili segenap jajaran DPR RI turut berbelasungkawa terhadap keluarga korban yang ditinggalkan. Sebagaimana diketahui, dari 240 penumpang pesawat, 7 diantaranya merupakan warga negara Indonesia.

“Kita turut berbelasungkawa atas kejadian ini, terutama kepada keluarga yang ditinggalkan. Kita turut berdu-

kacita. Kita berharap mereka diberi kesabaran dan ketabahan,” kata Marzuki, saat ditemui di ruang kerjanya, usai menerima Dubes Oman, Selasa (25/03).

Namun, Politisi Demokrat ini memberi catatan, Pemerintah Malaysia harus dapat mengungkap kejadian sebenarnya dari kecelakaan ini. Pasalnya, pencarian pesawat sudah berlangsung lama, dan sampai melibatkan banyak pihak.

“Malaysia harus mengungkapkan kejadian sebenarnya. Jangan sampai kasus ini terulang kembali, khususnya terkait dengan adanya indikasi terorisme atau pembajakan. Harus dijelaskan betul, apakah masalah teknis pesawatnya, atau ada hal-hal non teknis lainnya,” kata Marzuki dengan sedikit tekanan.

Ia juga mengingatkan Malaysia untuk dapat mempertahankan kepercayaan publik terhadap maskapainya.



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

“Tidak mungkin kita menghindari untuk tidak menggunakan pesawat Malaysia Airlines ini. Harapan kita, supaya kasus ini dapat diungkapkan kejadian sebenarnya, itu bisa dibuka ke publik. Sehingga dari situ akan menimbulkan kepercayaan publik kepada Malaysia Airlines,” harap Politisi berdarah Sumatera Selatan ini. (sf), foto : andri/parle/hr.

# DPR Minta Konkrit, Tangkap Pelaku Pembakaran Hutan



Anggota Komisi IV DPR Hermanto Tanjung.

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto Tanjung menyatakan kecewa karena pemerintah dinilai lamban dalam melakukan penegakan hukum kepada pelaku pembakaran hutan. Publik saat ini menunggu tindakan konkrit menindak pelaku pembakaran yang sudah terjadi berulang-ulang.

“Kita sadari kebakaran ini sudah berulang-ulang. Pemerintah perlu lakukan tindakan konkrit, menanngkap para pelaku. Pemda segera menindak jangan hanya statement saja,” katanya saat bicara dalam acara Dialog Radio Bersama Wakil Rakyat kerja sama Pemberitaan Setjen DPR dengan RRI di Jakarta, Jumat, (21/3/14).

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumbar I ini mengaku merasakan sendiri dampak kabut asap saat melakukan kunjungan ke sejumlah daerah pada masa reses seperti di Sijunjung, Damas Raya dan Payakumbuh. Bahkan Bandara Minangkabau Internasional sempat ditutup sementara karena tidak bisa mendarat karena kabut telah membatasi jarak pandang.



“Jadi pembakaran hutan ini sudah masuk kategori kejahatan ekonomi, lingkungan dan kejahatan kemanusiaan. Kita mencatat ada pihak korporasi yang berlindung dibalik rakyat, cabut saja izinnya,” tandas anggota FPKS ini.

Komisi IV menurutnya sudah melaksanakan tugas sesuai kewenangannya yaitu jauh sebelum bencana terjadi memberikan peringatan kepada sejumlah perusahaan. Dalam kunjungan kerja sebagai bagian dari tugas pengawasan sudah dilakukan pula sosialisasi sanksi bagi pelaku sesuai

UU no.14/1999.

“Kita pernah memanggil sejumlah perusahaan ke DPR meminta komitmen mereka untuk tidak lagi melakukan pembakaran. Komisi IV juga pernah melakukan kunjungan kerja ke lokasi perkebunan ini sesuai fungsi pengawasan dewan. Selanjutnya tugas eksekusi ada di pemerintah. Kalau Presiden SBY sudah turun dan mengatakan tangkap orangnya sudah saatnya aparat bertindak,” demikian Hermanto. (iky), foto : andri/parle/hr.

## Peran Koperasi Bisa Tekan Praktik Rentenir

Praktik rentenir yang menjerat masyarakat harus diminimalisir dengan mengoptimalkan peran koperasi di tangan masyarakat. Praktik rentenir selama ini telah merusak ekonomi rumah tangga, terutama di kalangan masyarakat kecil.

Demikian penegasan Anggota DPR RI Mahfudz Abdurrahman (F-PKS) saat menghadiri acara Koperasi Syariah Proibu Ukhuah di Asrama Haji Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (1/4). Semangat berkoperasi harus terus dhidupkan di tengah masyarakat, karena efektif menekan praktik rentenir.

“Kehadiran koperasi di tengah masyarakat mampu membendung perusakan ekonomi rumah tangga oleh rentenir,” kata Anggota Komisi V DPR itu. Ancaman rentenir, lanjutnya, semakin menggurita di tengah masyarakat dengan berbagai rayuan, khususnya masyarakat dengan tingkat

ekonomi lemah. Masyarakat harus dihibau untuk tidak menggantungkan hidupnya pada rentenir.

“Saya mendapat kabar, bahwa rata-rata satu anggota Koperasi Proibu Ukhuah bisa terjatuh 20 rentenir sekaligus untuk mengakali utang dengan cara gali lubang tutup lubang,” ungkap Mahfudz. Masyarakat perkotaan juga ternyata tidak bebas dari bahaya rentenir. Dan para rentenir itu, memang, selalu mencari ladang baru dengan menawarkan kemudahan mendapatkan uang.

Sementara itu, Koperasi Proibu Ukhuah ini, mayoritas beranggotakan kaum perempuan. Itu sangat baik untuk mengontrol ekonomi keluarga. “Mudah-mudahan kelompok koperasi syariah ini bisa lebih membesarkan ekonomi keluarga. Sebab, terdapat sistem yang menghindari perilaku riba di dalamnya,” jelas Mahfudz. Dan koperasi pun bisa terus hidup dengan



Anggota Komisi IV DPR Mahfudz Abdurrahman. aktivitas para anggotanya.

Menurut Mahfudz, “Ini merupakan proyek ketahanan keluarga. Sebab, masing-masing anggota bisa saling menutupi kekurangan anggota lainnya.” Saat ini keanggotaan Koperasi Proibu Ukhuah sudah mencapai 1.500 orang lebih. (ant, mh) Foto: doc/parle.

## DPR Siapkan Anggaran Stabilisasi Ketahanan Pangan

DPR RI telah menyiapkan anggaran stabilisasi ketahanan pangan. Ketua Komisi IV Mochammad Romahurmuziy menyatakan setidaknya Rp 2 triliun untuk program ini.

“Jumlah anggarannya Rp 2 triliun. Anggaran ini dapat digunakan untuk mengganti padi puso, apabila kemudian curah hujan tinggi, sehingga mengganggu panen yang puncaknya pada bulan Maret dan April ini,” kata Gus Romy, panggilan akrab Romahurmuziy, baru-baru ini.

Politisi PPP ini menambahkan, hal ini terkait banyaknya tanaman padi yang mengalami puso akibat bencana banjir serta serangan hama wereng batang cokelat dan tikus di berbagai daerah.

Selain itu, pihaknya juga telah menyediakan anggaran yang cukup untuk cadangan pestisida nasional yang dapat digunakan jika terjadi serangan hama.



“Kalau untuk cadangan pestisida nasional, jumlah persis-nya tergantung pada kondisi, karena DPR tidak menetapkan, tetapi pagu yang diberikan adalah pagu keseluruhan. Kami akan menakar itu sejalan dengan kejadian yang berlangsung,” tambah Politisi asal Dapil Jawa Tengah ini.

Terkait dengan program subsidi benih, tambah Romy, pihaknya telah menyediakan sejumlah benih unggul untuk merangsang petani menanam dengan benih yang anti-hama. (ant,sf) foto: iwan armanias/parle/hr.

Ketua Komisi IV DPR Romahurmuzyi.

## Penangkapan Kapal Timah Janggal

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, penangkapan kapal tongkang bermuatan timah yang dikawal oleh aparat kepolisian pada 7 Maret 2014 lalu yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, dinilai janggal.

“Seharusnya, penangkapan kapal tongkang berisi timah tersebut diserahkan pada instansi yang berwenang, yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai,” kata Mahfudz, Rabu (3/04) di Jakarta.

Menurut Politisi PKS ini, TNI AL memang memiliki wewenang mengamankan perairan Indonesia dan bukan hanya dari ancaman asing, tapi juga mencegah terjadinya pelanggaran hukum di perairan Indonesia.

“Tapi dalam kasus dugaan penyelundupan timah ilegal dari Batam menuju Singapura ini, TNI AL sesudah menangkap seharusnya menyerahkannya kepada Bea Cukai. TNI AL hanya memastikan bahwa penangkapan itu memiliki dasar hukum dan selanjutnya Bea Cukai melakukan tugas dan fungsinya,” tambah Mahfudz.

Menanggapi hal ini, Komisi I berencana mengundang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), sehingga mereka bisa menghadirkan Kementerian Pertahanan maupun Kementerian Keuangan agar tidak ada tumpang tindih kewenangan di kemudian hari.

Seperti diberitakan baru-baru ini, Komandan Pangkalan Angkatan Laut Batam Kolonel Laut Ribut Eko Suyatno mengatakan, pihaknya masih menelusuri pelanggaran dan menahan 58 kontainer berisi timah ilegal.



Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq.

Adapun timah berbentuk solder, anode, dan billet senilai 3,4 juta dollar Amerika atau Rp378 miliar itu akan diekspor ke Singapura dengan menggunakan kapal tongkang Bina Marine 76 yang berlayar dari pelabuhan laut Pangkal Balam, Bangka Belitung.

Penahanan peti kemas itu sendiri dilakukan setelah Kolonel Ribut mengundang instansi lain, di antaranya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, PT Surveyor Indonesia, dan Bursa Komoditi Derivatif Indonesia guna menganalisis sahidaknya timah itu diekspor. Penahanan menjadi sensitif lantaran kapal tersebut berlayar di bawah kawalan anggota Direktorat Polisi Air dan Udara berseragam serta bersenjata lengkap. (ant,sf) foto: iwan armanias/parle/hr.

## Cukup Rasional Kekhawatiran KPK

Ketua BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) yang sekaligus sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Sumarjati Aryoso menilai cukup rasional jika KPK khawatir akan dana bantuan sosial (bansos) yang kurang transparan. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya pencairan dana sosial

di 14 Kementerian menjelang pemilu, termasuk di Kementerian Agama. Hal tersebut diungkapkan Sumarjati kepada Parle, Kamis (3/4)

“Cukup rasional kekhawatiran KPK tersebut karena meningkatnya pencarian dana sosial di Kementerian-ke-

menterian. Kami hanya bisa berharap agar jangan sampai dana bansos itu digunakan untuk pencalegan atau pencapresan. Karena pada dasarnya bansos itu memang untuk rakyat tanpa ada embel-embel partai tertentu di dalamnya,”ungkap Sumarjati.



Khusus untuk di Kementerian Agama yang notabene menjadi mitra kerjanya di Komisi VIII DPR RI, Sumarjati malah mempertanyakan bantuan sosial yang sudah dicairkannya. Mengingat sampai hari ini masih banyak masyarakat atau siswa yang belum menerima BSM (Bantuan siswa miskin). Bahkan tunjangan guru di bawah Kementerian Agama pun belum juga dibayarkan. Padahal sejak 2013 Dirjen Pendidikan Islam Kemenag berjanji kepada DPR akan menyelesaikan hal itu dan membayar tunjangan guru. Namun hingga saat ini menurut Sumarjati hal tersebut belum juga dilakukannya.

"Saya sampai malu lho kalau ketemu masyarakat di daerah-daerah, karena sesuai janji Dirjen Pendis akan membayar tunjangan guru di bawah Kemenag, juga menyalurkan BSM ke masyarakat miskin, namun pada kenyataannya sampai sekarang belum juga dilakukan. Kalau sudah begini, masyarakat yang menagih janji pemerintah tersebut kepada kami," ujar poli-



Ketua BAKN DPR Sumarjati Aryoso.

tisi dari Fraksi Partai Gerinda ini.

Oleh karena itu sesuai masa reses DPR, Komisi VIII akan langsung memanggil Dirjen Pendis Kementerian

Agama untuk menjelaskan hal tersebut. Bahkan tidak tertutup kemungkinan hal tersebut juga akan disampaikan kepada Menteri Agama. (Ayu) foto: andri/parle/hr.

## Pemerintah Patut Bantu Napi Ikuti Program BPJS

Anggota Komisi III DPR RI Harry Witjaksono mengaku menerima masukan tentang belum terdatanya sejumlah narapidana di beberapa Lembaga Pemasyarakatan sebagai anggota BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Ia berpandangan sudah sepatutnya pemerintah memfasilitasi para napi yang statusnya sedang menjadi warga binaan.

"Sudah sepatutnya para narapidana yang berada di Lapas di seluruh Indonesia mengikuti program jaminan kesehatan yang dikelola BPJS. Seharusnya dananya sudah dianggarkan dalam APBN 2014," katanya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (3/4/14).

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jabar VI (Kota Bekasi dan Depok) ini menyebut sesuai konstitusi memperoleh pelayanan kesehatan adalah hak dasar warga negara. Ia berharap bekerja sama dengan BPJS, layanan kesehatan untuk para napi dapat lebih ditingkatkan.

"Saya sering berkunjung ke Lapas, melihat fasilitas kesehatan untuk warga binaan yang memang sangat minim. Ini harus diperbaiki karena mereka juga warga negara juga kan," tambahnya.

Pada sisi lain, ia meminta segenap pihak dapat memaklumi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS



Anggota Komisi III DPR Harry Witjaksono.

adalah program yang baru dijalankan pada awal tahun 2014. Sehingga proses pendataan layanan untuk seluruh rakyat Indonesia ini perlu waktu sampai tuntas menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

"Yang pasti masukan ini kita akan sampaikan kepada Menkumham cq Dirjen Lembaga Pemasyarakatan agar menjadi perhatian. Kalau ada kendala segera kita carikan solusinya," demikian Harry. (iky), foto: iwan armanias/parle/hr.

# Dana USO Jangan Salah Arah

Anggota Komisi I Tantowi Yahya mengingatkan Pemerintah agar jangan sampai penggunaan dana *Universal Service Obligation* (USO) salah arah dan melenceng dari amanat pemberi dana tersebut. Hal itu disampaikan kepada Parle, baru-baru ini di gedung DPR.

"Jangan sampai penggunaan USO itu melenceng jauh dari amanat yang diberikan oleh pemberi dana USO itu kepada Pemerintah. Penggunaan USO juga harus persetujuan dari DPR, dalam hal ini Komisi I," pesan Tantowi.

Politisi Partai Golkar ini juga menilai, masih ada tumpang tindih program yang dibuat Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi, dalam menggunakan dana USO ini.

"Menurut observasi dan evaluasi dari Bappenas, banyak program yang disiapkan oleh Kemenkominfo yang tumpang tindih satu sama lain. Bahkan, tumpang tindih pula dengan program Bappenas," jelas Politisi berdarah Sumatera Selatan ini.

Untuk itu, pihaknya akan mengawasi penggunaan dana ini. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi, agar program yang dijalankan tidak salah arah.

"Fungsi dari DPR adalah untuk mengawasi agar penggunaan dana USO itu sesuai dengan peruntukannya, yang diatur dalam Undang-undang, dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri. Kami juga mengundang pihak lain untuk mengevaluasi apa benar program yang telah disiap-



Anggota Komisi I Tantowi Yahya.

kan oleh pemerintah tersebut," jelas Tantowi.

Komisi I juga akan mencoba mengkomodir semua program-program yang telah disiapkan Pemerintah tersebut. Untuk kemudian, akan mengerucut usulan kepada beberapa program. "Agar supaya penggunaan USO itu efektif dan sesuai peruntukannya," tutup Tantowi. (sf)/foto: iwan armanias/parle/hr.

## DPR Mendesak Pemerintah Prioritaskan Kebutuhan Energi di Daerah Penghasil

Anggota Komisi IV DPR Sukiman (F-PAN) mendesak pemerintah memprioritaskan energi di daerah-daerah lumbung energi Indonesia, seperti koridor Kalimantan.

"Jadi jangan sampai daerah Kalimantan mengalami defisit BBM, artinya masih jauh dari harapan," kata Sukiman baru-baru ini di gedung DPR.

Berkaitan dengan ketertinggalan infrastruktur, dirinya melihat infrastruktur di Kalimantan masih belum terkoneksi antar daerah. "Ini masih jauh dari harapan dan masih belum dapat dihubungkan antar daerah,"

katanya.

Menurutnya, Kalimantan masih memiliki potensi besar dalam sektor pangan. Artinya, masih terbuka dalam membangun sawah baru di wilayah tersebut. "Kita harapkan dapat mendorong optimalisasi pangan guna mencapai kedaulatan pangan di Indonesia," ujarnya.

Saat ini, Trans Kalimantan ke arah selatan mulai dari Balikpapan, kondisinya memprihatinkan, berlubang di sana-sini saat keluar kota Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara hingga perbatasan Kaltim-Kalsel selepas



Anggota Komisi IV Sukiman.

Muara Komam.

Jalan aspal mulus terbentang hingga Kapuas di Kalimantan Tengah, kemudian berlubang-lubang sampai di Pulau Pisau, dan kembali mulus sampai Palangkaraya. (as), foto : iwan armanias/parle/hr.

# Angka Harapan Hidup di Papua Rendah

Angka harapan hidup masyarakat Papua sangat rendah. Semuanya disebabkan berbagai penyakit seperti malaria dan HIV AIDS. Butuh perhatian serius semua pihak, baik pemerintah maupun DPR.

Demikian ditegaskan Ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Papua Yorrys Raweyai (F-PG), belum lama ini di gedung DPR. Dari semua provinsi di Indonesia, angka harapan hidup masyarakat Papua paling rendah. Bahkan, sambung Yorrys, indeks pembangunan orang Papua juga terendah di Indonesia.

Di sinilah Tim Pemantau DPR mendesak pemerintah untuk memperhatikan hal krusial ini demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Yorrys menekankan pemerintah memperhatikan sektor kesehatan yang selama ini belum diperhatikan secara penuh. Tidak hanya kesehatan, sektor lain juga perlu segera diperhatikan untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua.

“Otsus ini diharapkan jadi final solusi bagi persoalan Papua,” tandas Yorrys. Sementara Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso juga berharap agar pemerintah serius memperhatikan percepatan pembangunan di Papua. Anggaran untuk Otsus sudah cukup besar dan harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Papua. “Papua sangat penting untuk diperhatikan DPR dan pemerintah,” harapnya.



Ketua Tim Pemantau Otsus Papua Yorrys Raweyai.

Gubernur Papua menjelaskan, 60% penduduk Papua miskin. Mereka tidak punya akses pendidikan, tidak punya rumah, bahkan untuk mendapatkan sumber air bersih juga sulit. Mereka kerap sulit keluar dari daerahnya, karena terisolir oleh topografi alam yang bergunung-gunung. (mh), foto : iwan armanias/parle/hr.

## Pembalakan Liar Harus Dihentikan



Anggota Komisi VII DPR RI, Bobby Adityo Rizaldi.

Anggota Komisi VII DPR RI, Bobby Adityo Rizaldi mendesak pembalakan

liar harus dihentikan, karena bencana banjir dan kebakaran hutan di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera semakin mencemaskan. Hal tersebut ditegaskan Bobby Adhityo Rizaldi kepada wartawan beberapa waktu lalu.

“Tegakkan undang-undang kehutanan, tata kelola dan perdagangan, sehingga upaya pemberantasan pembalakan liar dan perdagangannya dapat diminimalisir bahkan dihentikan,” kata Bobby.

Ditambahkan Bobby, upaya pengelolaan hutan secara berkesinambungan harus diwujudkan dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Dan sebagai

anggota DPR dimana salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah legislasi atau membuat Undang-undang, maka ia bertekad harus dapat menghasilkan produk perundangan yang akan mendukung berbagai pihak dalam mengelola dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup Indonesia.

Selain itu dilanjutkannya, berbagai upaya yang dilakukan mesti dioptimalkan, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara peningkatan ekonomi dengan pengelolaan lingkungan hidup. “Implikasinya, permasalahan banjir yang kerap terjadi akibat pembalakan liar, dapat dihentikan,”ujarnya. (ant/Ayu) Foto: doc. parle.

## Komisi III Dukung KPK Pantau Gratifikasi untuk Kampanye

Anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari mendukung upaya KPK untuk memantau dana kampanye yang bersumber dari gratifikasi terutama pada caleg *incumbent*. KPK menurutnya perlu lebih aktif melakukan pemantauan karena sebagai caleg ia juga berkepentingan pada pemilu yang adil dan jujur.

“Kita semua harus terima KPK menjalankan tugas tersebut dan perlu lebih serius mengkampanyekan ini termasuk kepada para pemilih. Sayapun berkepentingan soal ini karena bisa jadi saya akan menang kalau Pileg-nya berjalan *clean, clear* dan akuntabel,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (27/3/14).

Politisi Fraksi PDIP dari daerah pemilihan Jawa Timur VI (Kab. Blitar, Kab. Kediri, Kab. Tulungagung, Kota Blitar, dan Kota Kediri) ini berharap KPK dapat berperan lebih aktif sehingga

upaya penyimpangan itu dapat dicegah sejak awal. “Tapi kalau KPK pasif, menunggu saja ya percuma karena gelagatnya *money politic* akan marak,” tandasnya.

Bicara pada kesempatan berbeda anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Harry Witjaksono mengatakan langkah KPK tersebut patut diapresiasi karena sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.

“Kalau anggota dewan, pejabat negara lain menerima sumbangan, hadiah atau apapun yang bernilai dan mempengaruhi kewenangan yang dimiliki sehubungan dengan jabatan, itu namanya gratifikasi. Jadi harus lapor KPK,” paparnya.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan caleg yang merupakan pejabat *incumbent* baik itu legislatif ataupun eksekutif memiliki



Anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari.

aturan dana sumbangan yang ketat. Mereka hanya bisa menerima dana dari partai dan menggunakan kekayaan pribadi untuk kampanye.

“Ranah KPK itu gratifikasi, kalau ada laporan kita akan proses. Kalau bisa operasi tangkap tangan, kami akan lakukan itu untuk caleg yang menggunakan dana tidak semestinya,” demikian Adnan. (iky)/foto: iwan armanias/parle.

## DPR Minta Hormati Putusan MK Soal Empat Pilar

Ketua DPR RI Marzuki Alie mengingatkan semua pihak agar menghormati putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembatalan frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara”.

“Sekarang sudah keputusan MK, kita hormati. Istilah ‘empat pilar’ dibuang, menjadi ‘satu landasan tiga pilar’. Landasan ideologi Pancasila, tiga pilarnya UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selesai kan? Tidak ada persoalan, hanya istilah saja,” kata Marzuki di Gedung Nusantara, Jumat (4/04).

Marzuki mengakui selama ini empat pilar menjadi polemik, namun ia sebenarnya tidak mempersoalkan hal itu. Yang penting adalah pemahaman, penghayatan, dan pelaksanaan dari empat pokok-pokok kebangsaan tersebut.

“Empat pilar jadi polemik selama ini, saya tidak mau mempersoalkan. Yang penting, bagaimana kita memahami, menghayati, mempraktikkan, jadi tidak usah kita mempersoalkan,” tambah Politisi Demokrat ini.

Sebagaimana pemberitaan di berbagai media, MK pada



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

Kamis membatalkan frasa tersebut dalam keputusan uji UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) terkait Pancasila pilar kebangsaan yang dimohonkan sejumlah warga negara yang tergabung dalam Masyarakat Pengawal Pancasila Jogya, Solo, dan Semarang (MPP Joglosemar). (ant./sf) Foto: iwan armanias/parle.

# Sekjen DPR Terima Kuasa Usaha Kedubes Tiongkok



Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti menerima Kuasa Usaha Kedubes Tiongkok untuk Indonesia, Liu Hongyang.

Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti berjanji akan membantu mempercepat proses pengangkatan Dubes Tiongkok untuk Indonesia. Namun hal itu tentu setelah DPR menerima surat dari Presiden mengenai pengangkatan Dubes Tiongkok tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Win, begitu ia biasa disapa, saat menerima Kuasa Usaha Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia, Liu Hongyang, Rabu (2/4). Pada kesempatan itu, Liu menyampaikan bahwa di dalam negeri Tiongkok sendiri sudah ditetapkan Dubes Tiongkok untuk Indonesia yang baru, Xie Feng.

Liu meminta agar proses pengangkatan Xie Feng sebagai dubes Tiongkok yang baru untuk Indonesia dipercepat. Ia meminta bantuan dari DPR untuk mempercepat proses tersebut. Mengingat pada pertengahan bulan Mei mendatang Presiden SBY berencana untuk berkunjung ke negeri tirai bambu tersebut.

Untuk menyambut kedatangan Presiden RI tersebut tentu segala sesuatunya harus dipersiapkan secara matang. Oleh karena itulah perlu segera dilakukan pengangkatan secara resmi pengganti Dubes Tiongkok yang lama.

“Jadi meski dalam masa reses DPR tetap bekerja. Dua minggu yang lalu saja kita memproses pengangkatan

empat dubes. Kami tentu akan membantu mempercepat proses pengangkatan Dubes Tiongkok ini, namun setelah kami menerima surat dari Presiden. Karena kan proses pengangkatannya dari internal pemerintah yaitu Kemenlu (*inter-dept*) surat dibawa ke Presiden, dari Presiden baru dikirim ke DPR. Di DPR sendiri surat tersebut akan dibahas bersama antara pimpinan DPR, Komisi I dan pimpinan fraksi. Baru kemudian disepakati atau secara resmi dilakukan pengangkatan Dubes Tiongkok yang baru. Tetapi sampai hari ini kami belum menerima surat tersebut dari Presiden,” papar Win.

Lebih lanjut Win berharap agar pengangkatan Xie Feng sebagai Dubes Tiongkok untuk Indonesia yang baru ini dapat semakin mempererat hubungan antara kedua negara. Mengingat sebelumnya Xie Feng pernah menduduki beberapa jabatan penting di negaranya, seperti Direktur Jenderal di Kementerian Luar Negeri RRC yang membawahi Amerika Utara dan Oseania, bahkan Xie Feng juga pernah menjabat sebagai Wakil Dubes China di Amerika Serikat.

Sementara untuk Dubes Tiongkok yang lama, Liu Ji-anhao, Win mengucapkan selamat atas jabatan yang baru diembannya, yaitu sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok. Tentu saja jabatan barunya itu dapat diraih setelah keberhasilannya menjadi Dubes untuk Indonesia. (Ayu) *foto:rizka/parle/iw.*



Ketua DPR RI Marzuki Alie melantik Anggota PAW Zaenuddin (F-PD), menggantikan Anggota Komisi X Ita Octavia Jayabaya, Selasa (1/4). Foto: Andri/Parle/Hr.



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti didampingi Karo Kesekretariatan dan Pimpinan Tatang Sutharsa, dan Karo Humas dan Pemberitaan Djaka Dwi Winarko menerima delegasi Parlemen Laos terkait penyelenggaraan AIPA yang akan datang di Laos, Selasa (1/4). Foto: Andri/Parle/Hr.



Deputi Bidang Perundang-undangan Johnson Rajagukguk dan Karo Humas dan Pemberitaan Djaka Dwi Winarko menerima Mahasiswa Erasmus Universiteit Rotterdam, Belanda. Rabu (2/04). Foto: Andri/Parle/Hr.